

## Counseling on Strengthening Human Resources of Bawaslu Merangin Regency

### Penyuluhan Penguatan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Merangin

<sup>1</sup> Salman

<sup>2</sup> Fuji Cantika

<sup>3</sup> Fitri Handayani

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: [salmansayuti85@gmail.com](mailto:salmansayuti85@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

---

#### INFO ARTIKEL:

---

##### Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Desember 2024

Direvisi: 03 Januari 2025

Diterbitkan: 24 Januari 2025

##### Keywords:

Counseling;

Election Supervision;

Ethics and Integrity.

##### Kata Kunci:

Penyuluhan;

Pengawasan Pemilu;

Etika dan Integritas.

---

#### Abstract:

*Effective election supervision is crucial in ensuring honest, fair, and transparent elections. This study aims to improve the election supervisors' skills in Merangin Regency through counseling, simulations, and hands-on practice, as well as strengthening the ethics and integrity of supervisors in carrying out their duties. The method used in this community service is the provision of theoretical materials followed by election supervision simulations that depict various stages of the election process. Participants are also trained to understand the importance of maintaining ethics and integrity in every action they take. The results of this service show that simulations and hands-on practice enhance the technical skills of supervisors, while strengthening ethics and integrity bolsters supervisors' commitment to a fraud-free election. It is hoped that this activity can improve the quality of election supervision in Merangin Regency and create more credible and trusted elections in the community.*

---

#### Abstrak:

Pengawasan pemilu yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengawas pemilu di Kabupaten Merangin melalui penyuluhan, simulasi, dan praktik langsung serta memperkuat etika dan integritas pengawas dalam menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemberian materi teoritis yang dilanjutkan dengan simulasi pengawasan yang menggambarkan berbagai tahapan pemilu. Selain itu, peserta juga dilatih untuk memahami pentingnya menjaga etika dan integritas dalam setiap tindakan mereka. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa simulasi dan praktik langsung dapat meningkatkan keterampilan teknis pengawas, sedangkan penguatan etika dan integritas dapat memperkuat komitmen pengawas terhadap pemilu yang bebas dari kecurangan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Merangin serta menciptakan pemilu yang lebih kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.



## **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintah yang terpilih. Dalam pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat vital (Satria, 2023). Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan jalannya pemilu tanpa kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, serta menjaga hak-hak pemilih agar terlindungi dengan baik (Afifudin, 2020). Di Kabupaten Merangin, seperti halnya di daerah lainnya, pengawasan yang efektif terhadap pemilu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bawaslu. Oleh karena itu, penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Merangin menjadi suatu hal yang sangat penting agar lembaga ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Penyuluhan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja pengawas pemilu di daerah tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan pemilu daerah serentak telah menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, terutama bagi Bawaslu yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemilu dengan menjaga independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas (Fauziah, 2023). Pemilu yang serentak ini mengharuskan Bawaslu untuk memantau berbagai aspek sekaligus, mulai dari verifikasi pemilih, pengawasan kampanye, pengawasan pencoblosan, hingga penyusunan rekapitulasi hasil suara (Aermadepa, 2024). Mengingat kompleksitas yang ada, penguatan kapasitas SDM di Bawaslu Kabupaten Merangin menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Para pengawas pemilu di daerah ini perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang lebih luas mengenai regulasi pemilu serta teknologi informasi yang semakin berkembang pesat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai penguatan SDM Bawaslu adalah melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan kewajiban Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengawasan yang profesional dan independen dalam rangka menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis (Syafarani, 2024). Dengan penyuluhan, anggota Bawaslu di Kabupaten Merangin diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang proses pemilu yang harus diawasi, serta teknik-teknik pengawasan yang efektif dan efisien. Kegiatan penyuluhan ini juga perlu disesuaikan dengan konteks lokal, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan sosial masyarakat setempat.

Penyuluhan yang difokuskan pada penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Merangin akan membekali para pengawas dengan keterampilan dalam mengelola data dan informasi pemilu, serta kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawas dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik dalam memberikan informasi terkait proses pemilu maupun dalam melaporkan temuan pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya difokuskan pada

peningkatan kapasitas teknis pengawasan pemilu, tetapi juga pada penguatan aspek integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu yang profesional dan bertanggung jawab.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam penyuluhan ini juga akan melibatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif yang dapat membantu memperkuat fungsi Bawaslu dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran pemilu. Masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dan melaporkannya kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Pengawasan yang berbasis pada partisipasi masyarakat ini akan meningkatkan kualitas pemilu, serta memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat bahwa pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Merangin adalah keterbatasan sumber daya dalam hal anggaran, fasilitas, dan teknologi yang memadai untuk mendukung pengawasan yang maksimal. Dalam hal ini, penyuluhan yang dilakukan diharapkan juga dapat membuka wawasan para pengawas tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengawasan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi berbasis TIK dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemilu, serta mempercepat pelaporan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penyuluhan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penguatan SDM Bawaslu.

Diperlukan juga strategi penguatan kapasitas yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek mental dan etika kerja pengawas pemilu. Pengawas yang profesional harus memiliki komitmen tinggi terhadap integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya (Alaydrus, 2023). Penguatan karakter dan etika kerja pengawas pemilu perlu menjadi bagian penting dari kegiatan penyuluhan ini. Dengan begitu, pengawas Bawaslu Kabupaten Merangin tidak hanya akan terampil secara teknis, tetapi juga akan memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menjaga kualitas pemilu yang dilaksanakan.

Pelaksanaan penyuluhan ini juga perlu didukung oleh kerjasama yang baik antara Bawaslu Kabupaten Merangin, instansi pemerintah terkait, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengawasan pemilu. Kerjasama ini akan membuka ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat jaringan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan begitu, penguatan SDM Bawaslu akan lebih maksimal dan pengawasan pemilu akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik (Fahriza, 2019).

Kegiatan penyuluhan ini juga sangat relevan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Merangin. Demokrasi yang baik membutuhkan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran lainnya. Dengan penguatan SDM Bawaslu yang kompeten, transparan, dan independen, diharapkan akan tercipta pemilu yang lebih berkualitas dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, penguatan SDM Bawaslu di Kabupaten Merangin bukan hanya soal meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan di daerah tersebut.

Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat tercipta sinergi antara Bawaslu, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menjaga kualitas pemilu yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Merangin. Penguatan SDM Bawaslu akan memberikan dampak positif pada pelaksanaan pemilu di masa depan, yang akan semakin melibatkan partisipasi masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Merangin secara keseluruhan.

## **METODE**

Metode pengabdian yang akan diterapkan dalam kegiatan ini adalah pendekatan penyuluhan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas (Rosadi, 2022). Penyuluhan ini akan dilakukan dengan mengikutsertakan anggota Bawaslu Kabupaten Merangin secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan melalui survei dan wawancara dengan anggota Bawaslu untuk mengetahui area-area yang memerlukan penguatan, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Hal ini bertujuan untuk merancang materi penyuluhan yang relevan dan sesuai dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan materi yang disampaikan bisa lebih terfokus dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan modul penyuluhan yang terdiri dari berbagai topik penting seputar pengawasan pemilu, termasuk regulasi yang berlaku, teknik pengawasan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan. Modul ini juga mencakup aspek penguatan integritas dan etika kerja pengawas pemilu, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas Bawaslu. Penyuluhan akan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, serta studi kasus yang melibatkan peserta secara aktif. Dengan demikian, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam proses pembelajaran yang dapat memperkaya pemahaman mereka mengenai pengawasan pemilu yang berkualitas.

Pada tahap pelaksanaan, penyuluhan akan dilakukan melalui serangkaian sesi yang terbagi dalam beberapa hari atau minggu, tergantung pada kebutuhan dan jadwal yang disepakati dengan Bawaslu Kabupaten Merangin. Setiap sesi akan difokuskan pada topik tertentu, dimulai dengan pengenalan tentang sistem pemilu, hingga teknik pengawasan yang lebih spesifik seperti pengawasan terhadap kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Para peserta juga akan diajak untuk memahami berbagai tantangan yang sering muncul dalam pengawasan pemilu dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang tepat. Dalam hal ini, metode penyuluhan akan sangat bergantung pada diskusi dan studi kasus yang menggambarkan situasi nyata di lapangan.

Untuk memastikan keterlibatan peserta secara maksimal, setiap sesi penyuluhan akan dilengkapi dengan simulasi dan praktek langsung mengenai tugas pengawasan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pemilu. Simulasi ini bertujuan agar peserta bisa merasakan langsung bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu dan bagaimana cara yang tepat untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran. Penggunaan simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih konkret bagi peserta dalam menghadapi situasi pemilu yang sebenarnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pengawas pemilu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

Metode pengabdian ini juga mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses penyuluhan dan mempermudah peserta dalam mengakses materi yang telah disampaikan. Pembelajaran berbasis teknologi ini akan melibatkan penggunaan aplikasi berbasis web dan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu pengawas dalam memonitor dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu. Selain itu, materi penyuluhan juga akan tersedia dalam bentuk digital agar peserta dapat mempelajarinya kembali kapan saja setelah kegiatan selesai. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan, serta memperkenalkan para pengawas pada perkembangan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta meningkat setelah mengikuti penyuluhan. Evaluasi ini akan dilakukan melalui ujian tertulis, diskusi kelompok, serta penilaian terhadap kemampuan peserta dalam melakukan simulasi pengawasan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi bagi peningkatan kualitas SDM Bawaslu Kabupaten Merangin pada kegiatan pengabdian berikutnya. Dengan cara ini, metode pengabdian tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengawasan pemilu di daerah tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Keterampilan Pengawasan Pemilu melalui Simulasi dan Praktik Langsung**

Peningkatan keterampilan pengawasan pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam pengabdian ini, terutama mengingat bahwa pengawas pemilu yang terampil dan profesional akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kualitas pengawasan yang dilakukan (Chandra, 2024). Pengawas pemilu yang memiliki keterampilan yang mumpuni dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan (Chandra, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis agar pengawas pemilu memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan (Ratama, 2023).

Dalam kegiatan pengabdian ini, simulasi dan praktik langsung menjadi metode yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan pengawas pemilu. Melalui simulasi, peserta dapat merasakan langsung bagaimana rasanya terlibat dalam situasi yang mungkin terjadi selama pemilu, seperti pengawasan terhadap kampanye, pemungutan suara, atau proses penghitungan suara. Kegiatan ini memungkinkan peserta untuk belajar bagaimana cara melakukan pengawasan dengan cermat, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Dengan cara ini, pengawas pemilu di Kabupaten Merangin tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang langsung dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari mereka.

Simulasi pengawasan ini dirancang untuk menggambarkan berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, baik dalam situasi yang berjalan lancar maupun ketika terjadi masalah. Misalnya, dalam pengawasan kampanye, peserta dapat diajarkan untuk memantau pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan aturan, serta bagaimana cara menindaklanjuti laporan pelanggaran yang berkaitan dengan

kampanye. Begitu pula dalam tahap pemungutan suara, simulasi dapat menggambarkan situasi di mana terdapat potensi kecurangan atau pelanggaran, seperti praktik politik uang, pemilih ganda, atau intimidasi. Dengan menghadapi berbagai situasi seperti ini dalam simulasi, peserta diharapkan dapat melatih diri untuk berpikir kritis dan bertindak cepat ketika menghadapi masalah serupa di dunia nyata. Selain itu, simulasi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berlatih dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam kondisi yang terkadang mendesak. Pengawas pemilu sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan seketika, dan keputusan yang salah bisa berpotensi merusak integritas pemilu itu sendiri. Dalam simulasi, peserta dilatih untuk mengenali pelanggaran dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai tanpa ragu. Dengan sering berlatih dalam situasi simulasi, pengawas pemilu akan semakin percaya diri dan terlatih dalam membuat keputusan yang tepat di lapangan, yang pada gilirannya dapat mencegah potensi pelanggaran yang dapat merusak jalannya pemilu.

Pentingnya simulasi ini juga terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pengalaman langsung yang memperkaya pemahaman peserta. Pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam sesi ceramah dan diskusi akan lebih mudah diterapkan jika diikuti dengan pengalaman praktis yang mengasah keterampilan dalam menangani situasi riil. Pengalaman langsung melalui simulasi akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses pengawasan pemilu. Dalam setiap simulasi, peserta akan dihadapkan pada berbagai skenario yang memaksa mereka untuk berpikir kreatif dan beradaptasi dengan situasi yang ada.

Simulasi juga memungkinkan peserta untuk berkolaborasi dengan sesama pengawas pemilu dalam tim. Pengawasan pemilu sering kali melibatkan kerja sama antara banyak pihak, baik antar anggota Bawaslu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat. Dengan bekerja dalam tim selama simulasi, peserta dapat belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan pemilu yang bersih dan sah. Keterampilan dalam bekerja dalam tim ini sangat diperlukan karena pengawasan pemilu adalah usaha kolektif yang membutuhkan sinergi antar berbagai pihak untuk mendeteksi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Setelah mengikuti serangkaian simulasi ini, peserta diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang tahapan pemilu, tetapi juga keterampilan praktis yang bisa mereka terapkan langsung saat pengawasan pemilu berlangsung. Simulasi yang dilakukan selama penyuluhan akan membekali pengawas dengan kesiapan yang lebih matang menghadapi tantangan lapangan. Ketika mereka benar-benar terjun ke lapangan, mereka sudah terbiasa dengan berbagai situasi yang mungkin timbul dan memiliki pengalaman untuk menangani masalah dengan baik. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin.

Peserta juga akan diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka selama simulasi. Evaluasi ini akan mencakup aspek-aspek penting seperti ketepatan dalam mendeteksi pelanggaran, kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat, serta kemampuan bekerja dalam tim. Melalui evaluasi, peserta dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta area yang perlu ditingkatkan. Proses evaluasi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk merefleksikan diri dan memperbaiki kinerja mereka dalam pengawasan pemilu

yang sesungguhnya. Simulasi dan praktik langsung juga memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman yang sangat efektif. Dengan melakukan simulasi berulang kali, peserta dapat belajar dari kesalahan dan perbaikan yang dilakukan dalam setiap sesi, sehingga mereka semakin terampil dan percaya diri dalam menghadapi tugas pengawasan di lapangan. Pengalaman yang diperoleh dalam simulasi ini juga menjadi bahan ajar bagi pengawas pemilu yang belum berpengalaman, yang dapat belajar banyak dari para pengawas senior yang sudah berpengalaman dalam menangani situasi-situasi tertentu.

Secara keseluruhan, metode simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Merangin dengan memberikan pengalaman yang lebih konkret dan aplikatif bagi para peserta. Dengan keterampilan yang terasah melalui simulasi, pengawas pemilu akan lebih siap dan lebih tanggap dalam menghadapi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih kredibel di Kabupaten Merangin.

Simulasi dan praktik langsung dalam penyuluhan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan pengalaman langsung yang mereka dapatkan, peserta akan lebih memahami bagaimana melaksanakan tugas pengawasan pemilu dengan benar. Pengalaman ini tentu saja akan memberikan bekal yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin di masa depan, serta memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah tersebut.

### **Penguatan Etika dan Integritas Pengawas Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil**

Penguatan etika dan integritas pengawas pemilu merupakan faktor kunci dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Tanpa adanya pengawas yang memiliki integritas yang tinggi dan standar etika yang jelas, pelaksanaan pemilu dapat menjadi rentan terhadap praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti kecurangan, politik uang, atau penyalahgunaan kekuasaan (Arqon, 2024). Pengawas pemilu yang menjaga integritas akan bertindak objektif, tidak memihak, dan mengutamakan kepentingan rakyat serta negara. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting dalam pengabdian ini adalah untuk memperkuat karakter pengawas pemilu melalui pelatihan dan penyuluhan yang menekankan pentingnya menjaga etika dalam pelaksanaan tugas mereka.

Proses penguatan etika dan integritas ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam kepada pengawas pemilu mengenai tugas dan tanggung jawab moral yang mereka emban. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat memengaruhi hasil pemilu dan menciptakan dampak yang jauh lebih besar bagi demokrasi. Penyuluhan mengenai etika pengawasan akan mencakup pemahaman tentang independensi dalam bertindak, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu. Pengawas yang memiliki pemahaman yang kuat tentang etika akan lebih mampu menjaga objektivitas dan independensi mereka, serta menghindari godaan yang dapat merusak kredibilitas pemilu (Dahri, 2023).

Salah satu aspek yang ditekankan dalam penguatan etika adalah mengenai penghindaran konflik kepentingan (Matin, 2024). Pengawas pemilu harus memiliki kesadaran penuh bahwa mereka tidak boleh memiliki hubungan atau afiliasi

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu, baik itu calon legislatif, calon kepala daerah, maupun pihak lain yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi. Pengawasan yang baik hanya bisa tercipta jika pengawas bertindak netral, tidak memihak, dan menghindari segala bentuk potensi bias yang bisa memengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, pelatihan dan penyuluhan juga akan fokus pada pengenalan dan penanganan konflik kepentingan agar pengawas pemilu dapat beroperasi secara adil dan jujur.

Penguatan integritas juga mengajarkan pengawas pemilu tentang pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Pengawas pemilu yang memiliki integritas tinggi akan selalu mengutamakan keterbukaan informasi kepada publik, memberikan laporan yang jujur, serta bersedia menghadapi pertanyaan atau kritik dari masyarakat terkait proses pengawasan yang dilakukan. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa proses demokrasi dijalankan dengan penuh keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, pelatihan penguatan integritas akan mencakup bagaimana menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat serta memberikan penjelasan yang jelas tentang setiap langkah yang diambil selama proses pengawasan. Selain itu, penguatan etika dan integritas juga mencakup pembekalan tentang bagaimana cara menghadapi tekanan atau godaan yang mungkin muncul selama proses pengawasan. Pengawas pemilu sering kali berada dalam situasi yang penuh tekanan, baik dari pihak peserta pemilu yang berkepentingan maupun dari tekanan politik atau sosial lainnya. Dalam situasi seperti ini, pengawas harus mampu menjaga sikap profesional dan etis, tidak mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran atau menerima tawaran yang dapat merusak integritas mereka. Penyuluhan akan memberikan keterampilan untuk menghadapi tekanan ini dengan cara yang bijak, serta memberikan dukungan moral agar pengawas tetap teguh pada prinsip etika dan integritas yang telah mereka pelajari.

Penguatan etika dan integritas juga berhubungan dengan peningkatan kesadaran pengawas akan pentingnya menjaga rahasia informasi yang mereka peroleh selama pengawasan. Dalam banyak kasus, pengawas pemilu akan mendapatkan akses kepada informasi yang sangat sensitif, seperti data pemilih, informasi kampanye, atau bahkan temuan pelanggaran yang sedang ditangani. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengawas untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya mengungkapkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelatihan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara melindungi informasi yang bersifat rahasia dan menghindari penyalahgunaan data yang bisa merugikan pihak tertentu.

Salah satu cara untuk memperkuat integritas pengawas pemilu adalah dengan memberikan contoh nyata tentang pengawasan pemilu yang berhasil dan berkualitas. Dalam pelatihan ini, pengawas akan diajarkan untuk memahami bagaimana pengawasan yang dilakukan dengan etika yang tinggi dapat berkontribusi pada terciptanya pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi. Penyuluhan akan mencakup studi kasus dan pembahasan tentang bagaimana pengawasan yang transparan dan jujur dapat memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan memahami dampak positif dari pengawasan yang berkualitas, diharapkan pengawas akan lebih termotivasi untuk menjaga integritas mereka selama menjalankan tugas.

Penguatan integritas juga mencakup pentingnya pengawasan terhadap diri sendiri. Setiap pengawas pemilu perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban. Mereka harus siap menerima evaluasi dan kritik terhadap kinerja mereka, serta bersedia melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Pengawas yang berintegritas tinggi adalah mereka yang tidak hanya menjaga kualitas pengawasan di lapangan, tetapi juga secara terus-menerus mengupayakan perbaikan dalam cara kerja mereka. Penyuluhan ini akan melibatkan peserta dalam refleksi diri, di mana mereka diajak untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang penting bagi mereka dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu.

Dalam pelatihan ini, juga akan ditekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan rekan sejawat dan pihak terkait lainnya. Pengawas pemilu yang memiliki integritas tinggi harus mampu bekerja sama dengan baik dalam tim, menjaga komunikasi yang jujur, serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Kerja sama yang baik akan memperkuat efektivitas pengawasan, karena pengawasan pemilu bukanlah tugas yang dilakukan secara individu, tetapi memerlukan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat. Pengawas yang berintegritas akan selalu menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari diskusi dan pertimbangan yang matang.

Penting juga untuk memberikan pengawasan internal dalam rangka memperkuat integritas pengawas pemilu. Dalam pengabdian ini, peserta akan diajarkan tentang mekanisme pengawasan internal yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap pengawas beroperasi sesuai dengan standar etika dan integritas yang telah ditetapkan. Pengawasan internal ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kode etik, tetapi juga untuk mendorong setiap pengawas untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dengan adanya pengawasan internal, diharapkan kualitas pengawasan akan semakin meningkat dan lebih terjamin integritasnya.

Penguatan etika dan integritas pengawas pemilu di Kabupaten Merangin diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Setiap pengawas yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip etika dalam tugas pengawasan mereka akan berkontribusi pada terciptanya sistem pemilu yang lebih transparan dan terpercaya (Suntara, 2024). Oleh karena itu, penting bagi setiap pengawas untuk terus memperkuat nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap langkah yang mereka ambil, sehingga pemilu yang diadakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah dalam pandangan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Penguatan etika dan integritas juga memiliki dampak jangka panjang terhadap reputasi lembaga pengawas pemilu itu sendiri. Ketika pengawas pemilu di Kabupaten Merangin menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, mereka tidak hanya menjaga kredibilitas pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan profesional. Dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan, masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin bahwa hak suara mereka dihargai dan dilindungi. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap proses pemilu, sehingga memperkuat kualitas demokrasi dan mempercepat pembangunan sosial-politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan keterampilan pengawasan pemilu melalui simulasi dan praktik langsung serta penguatan etika dan integritas pengawas pemilu merupakan langkah penting dalam memastikan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Simulasi yang dilakukan memberikan pengalaman nyata bagi pengawas pemilu untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan menangani situasi di lapangan secara cepat dan tepat. Di sisi lain, penguatan etika dan integritas pengawas pemilu memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan independensi, transparansi, dan tanpa terpengaruh oleh tekanan atau godaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya pemilu yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan keterampilan dan etika yang kuat, pengawas pemilu di Kabupaten Merangin diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Penguatan kompetensi teknis dan integritas ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sebagai hasilnya, pengabdian ini memberikan dampak positif bagi pemilu yang lebih transparan, adil, dan bersih, yang akan memperkuat fondasi demokrasi di Kabupaten Merangin dan secara keseluruhan di Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, terutama kepada Bawaslu Kabupaten Merangin yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh untuk melaksanakan program ini. Terima kasih juga kepada para pengawas pemilu yang telah bersemangat mengikuti setiap sesi penyuluhan, simulasi, dan praktik langsung. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara penyelenggara, peserta, dan seluruh pihak terkait. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan menciptakan pemilu yang lebih jujur, adil, dan transparan di Kabupaten Merangin.

## **KONFLIK INTEREST**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan penulisan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan politik uang di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.17>

- Chandra, F., & Harmaini, H. (2020). Problematika tatanan birokrasi sebagai instrumen politik di Indonesia. *ADIL*, 2(1), 1-12.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.19>
- Dahri, M., Sayuti, S., & Chandra, F. (2023). Penerapan kitab undang hukum pidana dan kitab undang hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara pidana pemilu. *Wajah Hukum*, 7(2), 508-519. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1294>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Manik-Fahriza, A. E. N. G., Telaumbanua, H. B., Anggraini-Nur, I. B. N. E., Salam, H. S. R., & Marzuki, S. W. A. Y. W. (2019). Perihal Para Penyelenggara Pemilu. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Matin, H. N. A., Cecep, C. D., Yoga, P. B., & Syaiful, S. (2024). Penguatan Etika Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Civic Governance dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Garut. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 409-421. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10673>
- Ratama, R., Situmorang, T. P., & Ginting, B. (2023). Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(3), 1030-1042.
- Rosadi, A., Nur, R. A., Ridwan, D., & Apriandinata, I. (2022). Pelatihan Penulisan dan Publikasi Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 125-130. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.297>
- Salman, & Farda, L. (2024). Sosialisasi Pemilu Serentak kepada Pemilih Pemula di Kabupaten Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 117-128. <https://doi.org/10.70308/voxpathuli.v1i2.78>
- Satria, I. R., & Rahman, M. R. T. (2023). Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 61-72. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>
- Suntara, R. A., & Zahri, T. A. (2024). Peran Pengawasan Partisipatif terhadap Perwujudan Civic Engagement dan Ketahanan Nasional dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2059-2070. <https://doi.org/10.54082/jupin.826>
- Syafarani, I. N. (2024). Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 440-449.